

Laporan Keuangan Audited Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahunan TA 2025 *Tahunan* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) serta PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Audited ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp41.312.999,- atau mencapai 100,09 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp41.274.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp79.223.227.182,- atau mencapai 99.84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp79.348.679.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp166.989.065.725,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp11.490.653,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp166.617.849.657,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp359.725.415,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp566.727.940,- dan Rp166.422.337.785,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp48.927.223,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp82.534.593.068,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp82.485.665.845,-). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp25.594.814,-, beban pelepasan aset non lancar Rp0,- dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp82.460.071.031,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp168.187.170.373,- dikurangi Surplus/defisit-LO sebesar Rp(82.460.071.031,-) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp80.695.238.443,- dan dikurangi Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp(1.764.832.588,-) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp166.422.337.785,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (403823)

<i>Dasar Hukum</i>	Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Organisasi dan tata kerja BRPPUPP diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. BRPPUPP berkedudukan di Jalan K.H. Bastari No.08 Jakabaring Palembang.
<i>Entitas dan Rencana Strategis</i>	

Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan dan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset perikanan perairan umum dan penyuluh perikanan;
- b. Pelaksanaan riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan perairan umum daratan;
- d. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; f. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat ditingkatkan yang pada

akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkualitas.”***

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Laporan Keuangan Audited ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Audited Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Audited ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa

yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12

(dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Semester II Tahun 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	41.274.000	41.274.000
Jumlah Pendapatan	41.274.000	41.274.000
Belanja		
Belanja Pegawai	63.991.324.000	70.065.504.000
Belanja Barang	11.046.805.000	9.283.175.000
Belanja Modal	750.000.000	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	75.788.129.000	79.348.679.000

Sampai periode yang berakhir per 31 Desember 2025, BRPPUPP melaksanakan 16 (Enam Belas) kali revisi DIPA petikan. Daftar revisi anggaran TA 2024 sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke - 01 sesuai Dokumen DS:8175-0033-0904-3069 tanggal 24 November 2023. Revisi DIPA ke-01 dilakukan dikarenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
2. Revisi DIPA ke - 02 sesuai Dokumen DS:8175-0033-0904-3069 tanggal 24 November 2024. Revisi DIPA ke-02 dilakukan karena mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
3. Revisi DIPA ke - 03 sesuai Dokumen DS:0946-0907-6386-5069 tanggal 24 November 2024. Revisi DIPA ke-03 dilakukan dikarenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
4. Revisi DIPA ke - 04 sesuai Dokumen DS:0946-0907-6386-5069 tanggal 20 Maret 2024. Revisi DIPA ke-04 dilakukan dikarenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
5. Revisi DIPA ke - 05 sesuai Dokumen DS:0946-0907-6386-5069 tanggal 16 April 2024. Revisi DIPA ke-05 dilakukan dikarenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.

6. Revisi DIPA ke - 06 sesuai Dokumen DS:0946-0907-6386-5069 tanggal 02 Juli 2024. Revisi DIPA ke-06 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
7. Revisi DIPA ke - 07 sesuai Dokumen DS:0946-0907-6386-5069 tanggal 15 Juli 2024. Revisi DIPA ke-07 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
8. Revisi DIPA ke - 08 sesuai Dokumen DS:0946-0907-6386-5069 tanggal 11 September 2024. Revisi DIPA ke-08 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
9. Revisi DIPA ke - 09 sesuai Dokumen DS:0946-0907-6386-5069 tanggal 14 Oktober 2024. Revisi DIPA ke-08 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
10. Revisi DIPA ke - 10 sesuai Dokumen DS:9102-0502-5742-5825 tanggal 05 November 2024. Revisi DIPA ke-10 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal dan Selfblocking akun perjalanan dinas.
11. Revisi DIPA ke - 11 sesuai Dokumen DS:5906-2430-0090-7002 tanggal 19 November 2024. Revisi DIPA ke-11 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal dan Pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap.
12. Revisi DIPA ke - 12 sesuai Dokumen DS: 5906-2430-0090-7002 tanggal 26 November 2024. Revisi DIPA ke-12 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan optimal.
13. Revisi DIPA ke - 13 sesuai Dokumen DS: 5906-2430-0090-7002 tanggal 13 Desember 2024. Revisi DIPA ke-13 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan Pergeseran anggaran dalam pagu tetap (Gaji Minus).
14. Revisi DIPA ke - 14 sesuai Dokumen DS: 5906-2430-0090-7002 tanggal 19 Desember 2024. Revisi DIPA ke-14 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan Pergeseran anggaran dalam pagu tetap (Gaji Minus).
15. Revisi DIPA ke - 15 sesuai Dokumen DS: 5906-2430-0090-7002 tanggal 31 Desember 2024. Revisi DIPA ke-15 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan Pergeseran anggaran dalm pagu tetap.
16. Revisi DIPA ke – 16 sesuai Dokumen DS: 5906-2430-0090-7002 tanggal 31 Desember 2024. Revisi DIPA ke-16 dilakukan karenakan mewujudkan nilai IKPA yang baik dan Pergeseran anggaran dalm pagu tetap.

Realisasi
Pendapatan
Rp41.312.999,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.312.999,- atau mencapai 100,09 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp41.274.000,-. Rincian pendapatan Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2025		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pend
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	29.024.000	5.736.000	19,76
Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya	0	0	0,00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	3.673.722	0,00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	8.000.000	0	0,00
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	4.250.000	9.287.556	218,53
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	0	22.615.712	0,00
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	0	9	0,00
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Pemerintah	0	0	0,00
Jumlah	41.274.000	41.312.999	100,09

- Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan didapat dari hasil penjualan SFV Mariana seperti penjualan benih dan ikan patin, juga hasil sewa alat seperti timbangan digital,
- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin seperti Lelang peralatan dan mesin terdiri dari 380 item yang terdiri dari alat perkantoran sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 793/KEPMEN-KP/PL.750/V/2025
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan didapat dari Sewa koperasi KP3 dan Sewa Tanah Instalasi Patratani,
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi didapat dari penjualan benih patin dan sewa alat oleh SEAFDEC,
- Penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu seperti pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2024,

Realisasi Belanja
Negara
Rp79.223.227.182,-

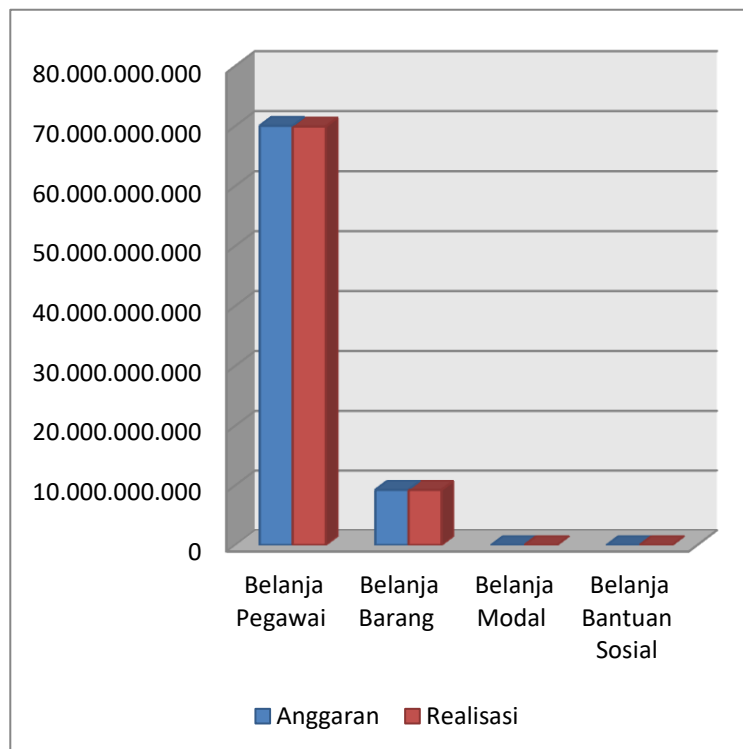
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp79.223.227.182,- atau 99,84 persen dari anggaran belanja sebesar Rp79.348.679.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	Semester II Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	70.065.504.000	69.956.047.202	99,84
Belanja Barang	9.283.175.000	9.274.304.333	99,90
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	79.348.679.000	79.230.351.535	99,85
Pengembalian	0	7.124.353	100,00
Jumlah	79.348.679.000	79.223.227.182	99,84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja 2025 mengalami penurunan (4,54) persen. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	69.948.922.849	66.962.021.370	4,46
Belanja Barang	9.274.304.333	16.029.196.024	(42,14)
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	79.223.227.182	82.991.217.394	(4,54)

Realisasi Belanja

Pegawai

Rp69.948.922.849,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.948.922.849,- dan Rp66.962.021.370,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,46 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang mengalami penambahan jumlah pegawainya.

Perbandingan Belanja Pegawai 2025 dan 2024

URAIAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	26.983.183.888	32.890.524.707	(17,96)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	7.346.873.215		
Belanja Lembur	26.190.000	22.514.000	16,33
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	35.599.800.099	34.053.969.698	4,54
Jumlah Belanja Kotor	69.956.047.202	66.967.008.405	4,46
Pengembalian Belanja Pegawai	7.124.353	4.987.035	42,86
Jumlah Belanja	69.948.922.849	66.962.021.370	4,46

Realisasi Belanja

Barang

Rp9.274.304.333,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.274.304.333,- dan Rp16.029.196.024,-. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar (42,14) persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Adanya penurunan dikarenakan efisiensi anggaran.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.133.535.870	4.803.970.799	(34,77)
Belanja Barang Non Operasional	2.336.648.400	6.672.306.427	(64,98)
Belanja Barang Persediaan	3.663.000	49.628.900	(92,62)
Belanja Jasa	3.423.216.368	1.775.157.116	92,84
Belanja Pemeliharaan	365.583.923	1.533.188.339	(76,16)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.656.772	1.201.108.431	(99,03)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	9.274.304.333	16.035.360.012	(42,16)
Pengembalian Belanja	0	6.163.988	(100,00)
Jumlah Belanja	9.274.304.333	16.029.196.024	(42,14)

*Realisasi Belanja
Modal Rp0,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 sebesar 0 persen dibanding 31 Desember 2024 dikarenakan adanya efisien anggaran.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

URAIAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Realisasi Belanja
Modal Tanah Rp0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK/ TURUN (%)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin Rp0,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,-, dibanding realisasi 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	SEMESTER II TA 2025	SEMESTER II TA 2024	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	0	0	(100,00)
Jumlah Belanja	0	0	(100,00)

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan efisiensi anggaran.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	SEMESTER II TA 2025	SEMESTER II TA 2024	Naik/ Turun (%)
Gazebo	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Realisasi Belanja
Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp0,-*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	SEMESTER II TA 2025	SEMESTER II TA 2024	Naik/ Turun (%)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dikarenakan efisiensi anggaran.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp9.789.098,-*

C.1 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.789.098,- dan Rp694.620,-. Terdapat Piutang Bukan Pajak sebesar Rp9.789.098,- yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai PNS sebesar Rp6.304.113,-
- b. Pegawai PPPK (P3K) sebesar Rp3.484.985,-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak (Rp48.945,-)*

C.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp48.945,-) dan (Rp3.473,-). Penyisihan itu disebabkan karena kurang catat pada pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2025 sehingga dilakukan koreksi pencatatan pada jurnal koreksi.

*Persediaan
Rp1.750.500,-*

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.750.500,- dan Rp17.336.900,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	1.750.500	3.148.000
Bahan Baku		14.188.900
Suku Cadang		0
Persediaan Lainnya		0
Jumlah	1.750.500	17.336.900

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp111.330.495.000,-

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BRPPUPP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111.330.495.000,- dan Rp111.330.495.000,-. Tidak terdapat pengurangan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	111.330.495.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2025	111.330.495.000

Tidak ada mutasi kurang pada Nilai Aset Tanah.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	484 m2	Jl. Taman Sari III Sukarami	1.503.265.000
2	437 m2	Jl. Taman Sari III Sukarami	1.357.287.000
3	530m2	Jl. Anwarsastro	3.396.408.000
4	561 m2	Jl. Rajawali no 491	4.425.593.000
5	2257m2	Jl. Beringin no 08	1.432.067.000
6	1554 m2	Jl. Beringin no 08	1.008.564.000
7	6404 m2	Jl. Beringin no 08	3.621.462.000
8	15989 m2	Jl. HA Bastari Jakabaring	90.627.306.000
9	26206 m2	Jl. Patratani	3.958.543.000
Jumlah			111.330.495.000

Peralatan dan

Mesin

Rp24.578.346.167,-

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp24.578.346.167,- dan Rp24.542.311.517,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24.542.311.517
Mutasi tambah:	0
Pembelian	
Transfer masuk dr BPPSDM KP	35.560.650
Reklasifikasi masuk	97.115.100
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi keluar	(96.641.100)
Saldo per 31 Desember 2025	24.578.346.167
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	24.578.346.167

Transfer Masuk sebesar Rp35.560.650,-,-. Rincian Transfer masuk adalah sebagai berikut :

1. Mesin pembuat pellet 1 unit sebesar Rp29.000.000,-
2. Lemari kayu 1 unit sebesar Rp2.183.650,-
3. Meja kerja kayu 2 unit sebesar Rp4.377.000,-

Rincian Reklasifikasi masuk sebagai berikut:

- 1 unit BMN yang masuk kategori jaringan kemudian dipindahkan ke kategori peralatan kantor lainnya
- 13 unit BMN yang termasuk kategori (3.09.02.04) alat persenjataan dilakukan reklasifikasi masuk menjadi BMN dengan kategori Alat Laboratorium (3.08). Hal ini dilakukan karena terdapat koreksi aset agar BMN tersebut sesuai dengan Tugas dan Fungsi BRPPUPP

Gedung dan

Bangunan

Rp72.142.582.357,-

C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo aset berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp72.142.582.357,- dan Rp72.142.582.357,-. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	72.142.582.357
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2025	72.142.582.357
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	72.142.582.357

Jalan, Jaringan dan

Irigasi

Rp7.753.767.267,-

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.753.767.267,- dan Rp7.754.241.267,-. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	7.754.241.267
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	0
Mutasi kurang:	(474.000)
Saldo per 31 Desember 2025	7.753.767.267
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7.753.767.267

Aset Tetap Lainnya
Rp244.815.000,-

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp244.815.000,- dan Rp244.815.000,-. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak dan alat bercorak kebudayaan yaitu Monograf sebesar Rp195.315.000,- dan Maket/Miniatur/Replika sebesar Rp49.500.000,-. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	244.815.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	0
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	244.815.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	244.815.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp49.432.156.134,-)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp49.432.156.134,-) dan (Rp47.636.526.056,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.578.346.167	(24.430.793.926)	147.552.241
2	Gedung dan Bangunan	72.142.582.357	(18.457.935.684)	53.684.646.673
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.753.767.267	(6.543.426.524)	1.210.340.743
4	Aset Tetap Lainnya	244.815.000	0	244.815.000
Akumulasi Penyusutan		104.719.510.791	(49.432.156.134)	55.287.384.675

Aset Tak Berwujud
Rp15.126.500,-

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp15.126.500,- dan Rp15.126.500,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud salah satunya berupa Paten yaitu berupa Alat Tangkap Pengilar Banyak Injap, Bubu Batang Portable, Alat Ukur Ikan Praktis . Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	15.126.500
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2025	15.126.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	15.126.500

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Paten	15.126.500
Jumlah	15.126.500

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp349.515.028,-

C.11 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp349.515.028,- dan Rp336.564.013,-.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan Dana direkening penampungan Kementerian/Lembaga yang merupakan Dana RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran yang terdiri dari Outsourcing Satuan Pengamanan, Outsourcing Pengolah Data, Outsourcing Gardener, Outsourcing Sekretaris, Outsourcing office Boy/Girls, Outsourcing driver, Outsourcing Mechanical Elektronik, Outsourcing Mechanical IT dan Langganan Daya dan Jasa.

Aset Lain-Lain
Rp313.135.000,-

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp313.135.000,- dan Rp1.082.847.777,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	1.082.847.777
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap	0
Mutasi kurang:	
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
- Penghapusan BMN	769.712.777
Saldo per 31 Desember 2025	313.135.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	313.135.000

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp318.051.113,-)

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp318.051.113,-) dan (Rp1.087.007.565,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Dana yang dibatasi penggunaannya	349.515.028	0	349.515.028
Paten	15.126.500	(4.916.113)	10.210.387
Jumlah	364.641.528	(4.916.113)	359.725.415
Aset Lain-lain	313.135.000	(313.135.000)	0
Jumlah	677.776.528	(318.051.113)	359.725.415

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp478.399.676,-*

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp478.399.676,- dan Rp434.075.553,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp478.399.676,- yang terbagi menjadi Belanja Barang yang masih harus dibayar seperti Listrik, Telpon, Air untuk bulan Desember 2025 sebesar Rp73.431.648,- Uang Makan PNS dan PPPK sebesar Rp 55.453.000,- dan RPATA sebesar Rp349.515.028,- terdiri dari Outsourcing Satuan Pengamanan, Outsourcing Pengolah Data, Outsourcing Gardener, Outsourcing Sekretaris, Outsourcing office Boy/Girls, Outsourcing driver, Outsourcing Mechanical Elektronik, Outsourcing Mechanical IT dan Langganan Daya dan Jasa.

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp88.328.264,-

C.15 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp88.328.264,- dan Rp122.231.931,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Adapun rincian penerimaan dari Sewa Koperasi dan sewa tanah Patratani dengan surat perjanjian kontrak sebagai berikut:

Surat Perjanjian Penggunaan/ Pemanfaatan Aset	Nilai Sewa/Tanggal Mulai	Jangak Waktu	Keterangan
K.2992/BRSD- BRPPUPP/PL.210/ VI/2023	6.998.500/ 3 tahun dimulai 5 Juni 2023	5 Juni 2023 sd 4 Juni 2026	100 m2 yang disewakan
575/KEPMEN- KP/SJ/PL.720/2024	4.712.500/3 tahun dimulai tanggal 1 Juli 2024	1 Juli 2024 sd 30 Juni 2027	12 m2 yang disewakan
B.1421/BRSDM- BRPPUPP/PL.210/ X/2023	150.000.000/5 tahun dimulai 31 Oktober 2023	31 Oktober 2023 sd 31 Oktober 2028	7.500 m2 yang disewakan

Saldo Januari 2025 sebesar Rp122.231.931,-. Dikurangi dengan pemakaian Januari sd Desember 2025 sebesar Rp33.903.667,- sehingga pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 88.328.264,-

Ekuitas
Rp166.989.065.725,-

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp166.989.065.725,- dan Rp168.187.170.373,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas merupakan selisih aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp48.927.223,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp48.927.223,- dan Rp119.417.802,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Naik (Turun)%
Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan	5.736.000	46.355.000	(87,63)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	33.903.667	66.996.773	(49,40)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	9.287.556	5.240.000	77,24
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		826.029	(100,00)
Pendapatan PNB	48.927.223	119.417.802	(59,03)

- Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan didapat dari hasil penjualan Kegiatan SFV Mariana seperti penjualan benih ikan patin, ikan patin konsumsi dan ikan nila.
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan didapat dari Sewa koperasi KP3 dan Sewa Tanah Instalasi Patratani,
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi didapat dari sewa alat oleh SEAFDEC seperti timbangan digital, mikroskop, dan pH meter

Beban Pegawai
Rp69.994.586.751,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.994.586.751,- dan Rp66.961.326.750,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Naik (Turun)%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	27.012.878.835	27.215.983.062	(0,75)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	7.368.206.915	5.671.075.608	29,93
Beban Lembur	26.190.000	21.819.380	20,03
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	35.587.311.001	34.052.448.700	4,51
Jumlah	69.994.586.751	66.961.326.750	4,53

Beban Persediaan
Rp19.249.400,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.249.400,- dan Rp83.102.300,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	5.060.500	64.925.900	(92,21)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0,00
Beban Persediaan bahan baku	14.188.900	18.176.400	(21,94)
Beban Persediaan barang hasil sitaan	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	19.249.400	83.102.300	(76,84)

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp10.353.920.737,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.353.920.737,- dan Rp13.425.784.935,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.974.549.348	9.541.566.341	(68,83)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	345.762	0	100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	143.654.000	0	100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	14.986.760	0	100,00
Beban Bahan	3.492.000	0	100,00
Beban Honor Output Kegiatan	2.329.384.000	0	100,00
Beban Barang Non Operasional	0	2.097.105.157	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.772.000	0	100,00
Beban Langganan Listrik	768.930.736	1.460.099.494	(47,34)
Beban Langganan Telepon	13.727.833	0	100,00
Beban Langganan Air	20.021.524	0	100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	300.000.000	0	100,00
Beban Jasa Pos dan Giro	0	2.384.698	(100,00)
Beban Barang Operasional - Darurat Bencana	0	0	0,00
Beban Sewa	0	37.410.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	0	30.000.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	3.781.056.374	255.369.245	1.380,62
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	1.850.000	(100,00)
Jumlah	10.353.920.337	13.425.784.935	(22,88)

Adapun beban honor output kegiatan sebesar Rp2.329.384.000,- adalah pembayaran gaji Penyuluh Perikanan Bantu sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 9 tahun 2025 tentang Penyuluh Perikanan Bantu tahun 2025 dan Keputusan KPA Nomor: K.0116/BRSDM-BRPPUPP/KU.110/II/2025 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) TA. 2025.

Dan beban jasa lainnya sebesar Rp 3.781.056.374,- adalah Outsourcing Satuan Pengamanan, Outsourcing Pengolah Data, Outsourcing Gardener, Outsourcing Sekretaris, Outsourcing office Boy/Girls, Outsourcing driver, Outsourcing Mechanical Elektronik, Outsourcing Mechanical IT dan Langganan Daya dan Jasa.

Beban
Pemeliharaan
Rp365.583.923,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp365.583.923,- dan Rp1.532.888.501,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Jasa Pos dan Giro	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.630.045	1.377.235.994	(93,93)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.496.878	399.656.380	(38,07)
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	34.457.000	103.816.831	(66,81)
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	23.000.000	(100,00)
Jumlah	365.583.923	1.903.709.205	(80,80)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp11.656.772,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.656.772,- dan Rp1.215.512.486,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas pada Tahun 2025 disebabkan karena efisiensi anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	11.656.772	1.164.512.486	(99,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0		0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	51.000.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Jumlah	11.656.772	1.215.512.486	(99,04)

Beban Barang
Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat
Rp0,-

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.789.550.013,-

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.789.550.013,- dan Rp1.951.376.385,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184.563.771	346.390.143	(46,72)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.549.305.150	1.549.305.150	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.924.767	54.924.767	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0		0,00
Jumlah Penyusutan	1.788.793.688	1.950.620.060	(8,30)
Beban Amortisasi Aset Lainnya	756.325	756.325	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	756.325	756.325	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.789.550.013	1.951.376.385	(8,29)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp45.472,-

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45.472,- dan (Rp942.933,-). Rincian untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak	45.472	(946.406)	(104,80)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah	45.472	(946.406)	(104,80)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp25.594.814,-

D.10 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	21.921.092	214.302.804	(89,77)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.673.722	148.602.000	(97,53)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	0,00
Jumlah	25.594.814	362.904.804	(92,95)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp168.187.170.373,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp168.187.170.373,- dan Rp170.419.078.867,-.

Surplus/Defisit LO
(Rp82.460.071.031,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp82.460.071.031,-) dan (Rp84.686.725.818,-). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,-

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,-

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-Lain Rp0,-

E.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp161.403.681,-). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp80.695.238.443,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp80.695.238.443,- dan Rp82.616.221.005,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(41.312.999)
Ditagihkan ke Entitas Lain	79.223.227.182
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	28.724.260
Pengesahan Hibah Langsung	1.484.600.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	80.695.238.443

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(41.312.999,-) sedangkan DKEL sebesar Rp80.695.238.443,- ditambah Transfer Masuk sebesar Rp28.724.260,-. Rincian Transfer masuk adalah sebagai berikut :

1. Mesin pembuat pellet I unit sebesar Rp29.000.000,-
2. Lemari kayu 1 unit sebesar Rp2.183.650,-
3. Meja kerja kayu 2 unit sebesar Rp4.377.000,-
4. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.836.390,-

E.5.2 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa tahun anggaran yang lalu sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp1.484.600.000,- yang merupakan hibah langsung berupa jasa yang telah di sahkan dengan SPM nomor 00237T tanggal 21 April 2025 dan nomor Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL) dengan nomor 823202348997857176 tanggal 23 April 2025 oleh KPPN Palembang.

Ekuitas Akhir

Rp166.422.337.785,-

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp166.422.337.785,- dan Rp168.187.170.373,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Terdapat Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember Tahun 2025 yang penyetoran/pengembaliannya dibulan Januari 2025 sebagai berikut :
 1. Tunjangan Kinerja Pegawai PNS sebesar Rp6.304.113,-
 2. Tunjangan Kinerja Pegawai P3K sebesar Rp3.484.985,-
- b. Terdapat Dana Penampungan RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) dengan BAST Kontraktual berakhir pada akhir Tahun Anggaran yang pembayarannya di awal Januari 2025 sebesar Rp.349.515.028,-
- c. Terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar berupa uang makan yang pembayarannya dilakukan di bulan Januari 2025 sebagai berikut:
 1. Uang Makan PNS sebesar Rp34.119.000,-
 2. Uang Makan P3K sebesar Rp21.334.000,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang antara lain sebagaimana terlampir.
- b. Terdapat koreksi terhadap Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas sisa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas sewa Gedung Koperasi KP3 Palembang dan sewa Tanah pada Instalasi Patratani dengan Jurnal Manual Koreksi sebagaimana terlampir.
- c. Adanya Perubahan SK pada tahun 2025 yaitu PPSPM an Achmad Nopianzah semula Sri Mulyani, Analisis Laporan Keuangan an Sri Mulyani semula Achmad Nopianzah dan PPABP an Sri Mulyani semula Eva Haryani serta Bendahara Pengeluaran an Eva Haryani semula Sri Rahayu Mansyur.

- d. Terdapat inkind kontribusi IFRDMD yang berasal dari anggaran BRPPUPP sebesar Rp8.380.710.217 dengan rincian sebagai berikut gaji pegawai yang terlibat dalam SK SEAFDEC-IFRDMD sebesar Rp2.352.957.411,- keperluan sehari-hari sebesar Rp4.557.840.122,- langganan daya dan jasa sebesar Rp809.345.156,- pemeliharaan sebesar Rp348.712.528,- dan manajerial sebesar Rp11.855.000,-